

**ANALISIS PENGELOLAAN KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDes) di DESA BAJIMINASA KECAMATAN
RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA**

**Diajukan Oleh :
NURWIDIYA NINGSI
4519012020**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik
Desa di Desa Bajiminasa Kec.Rilau Ale
Kab.Bulukumba

Nama Mahasiswa : Nurwidiya Ningsi

Stambuk/NIM : 4519012020


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

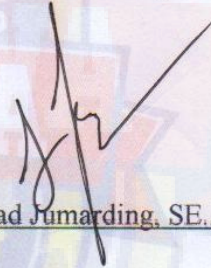
Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sukmawati Marjuni, SE., M.Si.



Ahmad Jumarding, SE.,MM

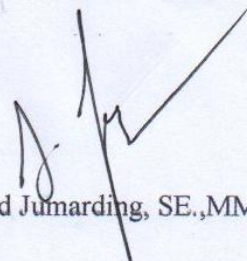
Mengetahui dan Mengesahkan:
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Manajemen**



Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE.,MM



Ahmad Jumarding, SE.,MM

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KOERSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurwidiya Ningsi
NIM : 4519012020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen
Judul : Analisis Pengelolaan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupataen Bulukumba

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 2023
Mahasiswa yang bersangkutan



Nurwidiya Ningsi

MOTTO

“it's not always easy, but that's life. be strong because there are better days ahead.”

Kamu tak akan mampu membuat semua manusia senang, Maka perbaikilah hubungan antara dirimu dengan Allah, dan jangan pedulikan apa kata manusia



KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “Analisis Pengelolaan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada (Bapak Basri, Ummi Kartini, Kakak Wira) orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Sehat aelalu dan hiduplah lebih lama lagi, Ilove you more and more.

Penulis juga ucapkan teima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Pertama-pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,M.Si.
2. Ibu Dr. Herminawaty Abu Bakar SE.,MM.,CSBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Indrayani Nur, S.Pd.,SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

4. Bapak Ahmad Jumarding SE.,MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Kepada Ibu Dr. Sukmawati Marjuni, SE., M.Si dan Bapak Ahmad Jumarding, SE.,MM sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi- diskusi yang dilakukan dengan penulis.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan- kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala di sisi Allah SWT, Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.
7. Kepada Kantor Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba bapak Anshar Arsyad atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberi motivasi, dorongan, semangat selama penulis menyelesaikan skripsi.
9. Kepada pemilik nama Deril Bahlil Pratama terimakasih selalu ada buat saya, memberikan semangat dan support dengan kebahagiaan sederhana,

terima kasih selalu menemani, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini penuh kebahagiaan.

10. Terima kasih kepada ina, hainun, nining yang telah banyak memberi saran, masukan, serta semangat selama menyelesaikan skripsi.
11. Kepada sahabat-sahabat yang telah bersama sejak menjadi mahasiswa baru di Universitas Bosowa Makassar.
12. Kepada seluruh teman-teman Manajemen kelas A Ang.19. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih selama perkuliahan telah menjadi teman

Makassar,

2023

Penulis

Nurwidiya Ningsi

ANALISIS PENGELOLAAN KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) di DESA BAJIMINASA KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Nurwidiya Ningsi. 2023. Skripsi. Analisis Pengelolaan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dibimbing oleh Dr. Sukmawati Marjuni, SE., M.Si dan Ahmad Jumarding, SE.,MM.

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang diterima dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba berupa data-data jumlah anggaran pendapatan, realisasi penerimaan dan pengeluaran sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Hasil penelitian menyakan bahwa Rasio Profitabilitas atau Return On Equity (ROE), pengelolaan modal terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba telah tefektif ini dibuktikan dengan rasio Return On Equity berada diatas rasio standa ($59,26\% > 40\%$). Berdasarkan Rasio Likuiditas atau Rasio aktiva lancar (Current Ratio), pengelolaan modal terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba telah mandiri, ini di buktikan dengan rasio rata-rata aktiva lancar (Current Ratio) yang berada di atas standar ($1183,75\% > 200\%$). Berdasarkan Rasio Solvabilitas atau utang terhadap modal (Debt to Equity Ratio), pengelolaan modal terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tergolong efisien atau sehat karena rasio utang terhadap modal (Debt to Equity Ratio) berada di atas standar ($37,04\% > 30\%$)

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas

**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE MANAGEMENT OF
VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDes) IN BAJIMINASA VILLAGE,
DISTRICT RILAU ALE BULUKUMBA DISTRICT**

Abstract

Nurwidiya Ningsi. 2023. Thesis. Analysis of Financial Performance Management of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Bajiminasa Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency, supervised by Dr. Sukmawati Marjuni, SE., M.Si and Ahmad Jumarding, SE., MM.

In accordance with the problems raised in this study, the purpose of this research is to analyze and find out how the financial performance of Village Owned Enterprises (Bumdes) in Bajiminasa Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency is measured using profitability ratios, liquidity ratios and solvency ratios.

In this study, the analysis technique used was descriptive analysis with a quantitative approach which was carried out by collecting data received from

Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Bajiminasa Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency in the form of data on the amount of revenue budget, realization of receipts and expenses so as to provide a clear enough picture for the author to analyze and compare with existing theory.

The results of the study stated that the Profitability Ratio or Return On Equity (ROE), capital management on the financial performance of Bajiminasa Village-Owned Enterprises, Rilau Ale District, Bulukumba Regency has been effective. This is evidenced by the Return On Equity ratio which is above the standard ratio (59.26% > 40%). Based on the Liquidity Ratio or Current Assets Ratio, capital management on the financial performance of Village Owned Enterprises (BUMDES) in Bajiminasa Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency has been independent, this is evidenced by the average current asset ratio (Current Ratio) which is above the standard (1183.75% > 200%). Based on the Solvency Ratio or debt to equity (Debt to Equity Ratio), capital management on the financial performance of Village Owned Enterprises (BUMDES) in Bajiminasa Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency is classified as efficient or healthy because the debt to equity ratio (Debt to Equity Ratio) is above standard (37.04% > 30%).

Keywords : *Financial Performance Profitability Ratios Liquidity Ratios and Solvency Ratios.*

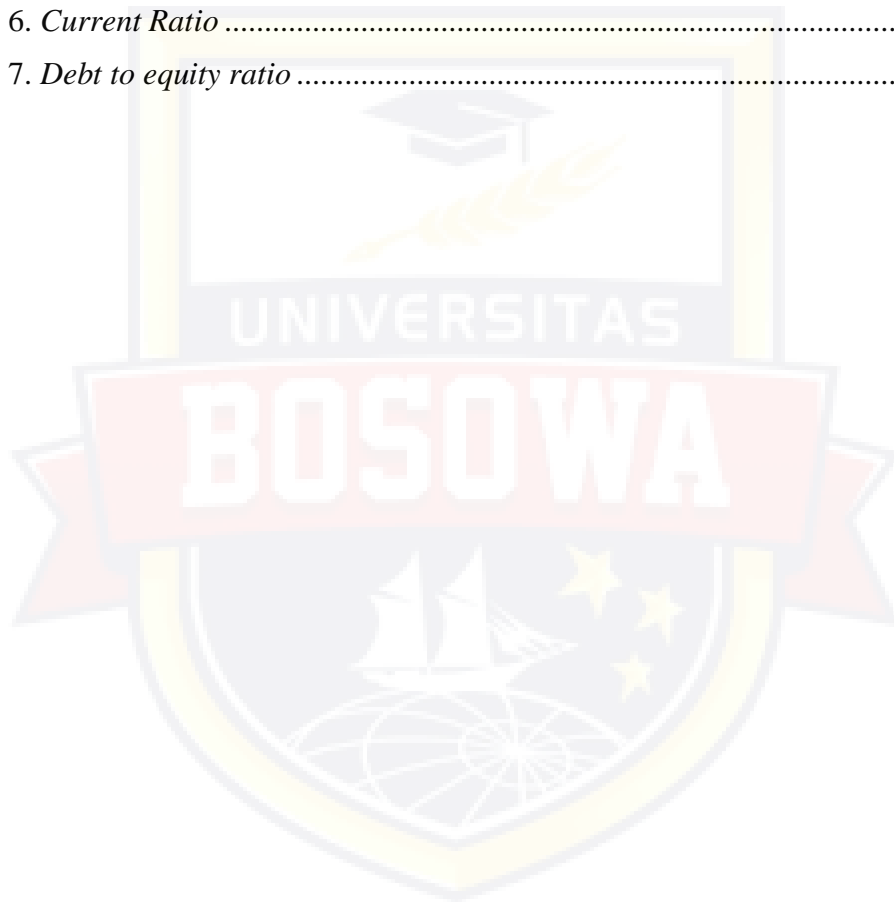
DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KOERSINILAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Lingkup Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Pengertian Desa	10
2. Pengelolaan Keuangan Desa	12
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	19
4. Analisis Keuangan Daerah	21
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	24
B. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Pikir.....	35
D. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
B. Populasi dan Sampel	37
C. Instrument Penelitian	38

D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Analisis.....	40
G. Definisi Operasional.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Garis Besar Kota Bumdes Bajiminasa, Kawasan Bir Rilau, Peraturan Bulukumba	42
1. Struktur Organisasi	45
B. Penyajian Data Hasil Penelitian	47
1. Analisis Rasio Profitabilitas	47
2. Analisis Rasio Likuiditas.....	48
3. Analisis Rasio Solvabilitas	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
1. Analisis Rasio Profitabilitas	52
2. Analisis Rasio Likuiditas.....	52
3. Analisis Rasio Solvabilitas	53
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penilaian Efektivitas	22
Tabel 2. Penilaian Kemandirian.....	23
Tabel 3. Penilaian Efisiensi	24
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	32
Tabel 5. <i>Return on Equity</i>	48
Tabel 6. <i>Current Ratio</i>	49
Tabel 7. <i>Debt to equity ratio</i>	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	35
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan kota merupakan pusat kegiatan pergantian masyarakat, karena kota merupakan sub bagian dari wilayah publik yang langsung berhubungan dengan wilayah setempat. Namun, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara wilayah metropolitan dan provinsi. Berbagai upaya untuk menaklukkan lubang telah dilakukan oleh otoritas publik. Pada tahun 1994 badan publik mengeluarkan Program Pembinaan Resmi Kota Terhambat (IDT), yang kemudian menciptakan berbagai proyek, khususnya Program Perbaikan Daerah (PPK) yang dilaksanakan oleh Dinas Usaha Rumah Tangga, Program Penanggulangan Kemiskinan Metropolitan (P2KP) yang program Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagainya. Proyek-proyek yang dibentuk dikerjakan oleh divisi.

Mulai sekitar tahun 1998 telah terjadi beberapa perubahan mendasar, khususnya adanya kerangka desentralisasi, perubahan kerangka moneter negara dan kerangka pengaturan peningkatan publik, yang mempengaruhi semua prakarsa yang didukung pembayar pajak, termasuk program yang dibentuk oleh otoritas publik untuk mengatasi variasi antar lokal. Perbaikan kota melalui kerangka kerja pemerintah yang terkoordinasi akan mempermudah kota untuk menjadi kota bebas. Kota harus memiliki pendapatan seperti itu, artinya kota memiliki APBDes kecil dan juga tergantung levelnya ketimpangan & kemelaratan paling jauh adalah merupakan penyebab kesulitan kota untuk

memiliki pendapatan asli kota yang tinggi, aset fungsional rendah untuk menawarkan jenis bantuan publik, banyak perbaikan sedang dilakukan oleh kota, namun tidak diawasi secara bebas oleh kota. Jadi kota tidak bisa bebas. Pembenahan kota dengan arah pemanfaatan aset kota melalui BUMDes diharapkan memiliki opsi untuk menggali potensi kota. Saat ini kota tersebut memiliki kemampuan beradaptasi sumber daya yang didapat dari beberapa perspektif.

Sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota, ayat 1 pasal 72 upah kota berasal dari upah asli kota (Cushion), yang dimaksud dengan Bantalan, khususnya hasil usaha, hasil, bekerja sama, pengembangan diri dan dukungan & pendukung sejenisnya asli, peruntukan APBN (Rencana belanja pendapatan dan konsumsi negara), sebagian jalan yang diperoleh dari penilaian daerah dan kebutuhan daerah atau kota, ADD (Penugasan Aset Kota) yang keadaannya disesuaikan dengan cadangan yang diperoleh dari daerah/perkotaan masyarakat, bantuan yang diperoleh dari APBD (Rencana Keuangan Pendapatan dan Penggunaan Wilayah) 3 Umum dan Rezim/APBD Kota, hadiah atau penghargaan yang tidak terbatas dari pihak luar, dan gaji asli kota. Jenis pendapatan ini membantu kota dalam melakukan proyek untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah (Rofidah 2019).

Pedoman Pendeta Usaha Rumah Tangga Tentang “Usaha Klaim Desa” Nomor 39 Tahun 2010 yang dikuasakan pada otoritas publik, Kota yang mengikuti program BUMDes dapat memenuhi kebutuhan keuangannya sambil memperluas kemampuan pertama daerahnya” Peningkatan BUMDes di

Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Kota, Pembinaan Daerah Bingung dan Keimigrasian (PDDT) jumlah BUMDes mengalami peningkatan secara keseluruhan dimana pada tahun 2014 hanya berjumlah 1.022 unit dan pada tahun 2021 berjumlah 57.273 unit BUMDes dengan rincian 45.233 BUMDes dinamis dan 45.233 dinamis BUMDes di Indonesia 12.040 BUMDes (Waseso, 2021). Di Indonesia tepatnya di Wilayah Bali hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 636 kota dengan 588 unit BUMDes (Novelino, 2021).

Namun dengan pesatnya perkembangan BUMDes di Wilayah Bali, akhir-akhir ini banyak BUMDes yang mengalami kerugian dalam pengelolaan keuangan karena tidak diawasi secara ahli, kecakapan dan kelangsungan pengelolaan keuangan BUMDes. Konsentrasi pada administrasi BUMDes harus dilengkapi dengan beberapa lubang pemeriksaan. Pertama-tama, kajian administrasi UKM, meskipun dilihat dari skala usaha setara dengan BUMDes, atribut manfaat yang diatur UKM tidak sama dengan BUMDes yang memiliki kualitas usaha sosial atau usaha sosial. Dengan atribut campuran tersebut, maka penyelenggaraan BUMDes memiliki kualitas yang unik, khususnya BUMDes harus bertanggung jawab secara moneter dan sosial. Kedua, kajian administrasi BUMDes saat ini sedikit banyak berbicara tentang administrasi, misalnya komponen tanggung jawab. Komponen tanggung jawab adalah komponen administrasi secara keseluruhan, sedangkan komponen administrasi BUMDes yang terpisah dari substansi yang berbeda adalah komponen kerjasama. Ketiga, berkonsentrasi pada penyelenggaraan pemerintahan dalam usaha-usaha

persahabatan yang diarahkan di berbagai negara, misalnya di Inggris, memiliki tatanan sosial dan ekologis sosial yang berbeda dari usaha-usaha sosial di Indonesia. BUMDes yang didirikan di Indonesia memiliki sifat usaha sosial, namun atributnya tidak sama dengan usaha social enterprisedi UK (Widiastuti et al. 2019).

Pendirian BUMDes bertujuan : mengembangkan lebih lanjut ekonomi kota; memajukan sumber daya kota sehingga berguna untuk bantuan pemerintah kota; memperluas usaha daerah dalam menghadapi potensi keuangan kota; mendorong rencana partisipasi bisnis antar kota dan juga dengan pihak luar; membuka pintu dan jaringan pasar yang membantu masyarakat membantu kebutuhan warga; buka pekerjaan pintu terbuka yang berharga; memperluas bantuan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan terbuka, mengembangkan dan menyeimbangkan perekonomian kota; dan memperluas pembayaran area lokal kota dan pembayaran unik kota.

Pemerintah Kota berpendapat bahwa pengaturan dan pengurus BUMDes harus lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah, mendorong potensi kota dan otonomi keuangan kota dengan latihan dan organisasi yang telah diawasi oleh BUMDes dengan mengaktifkan daerah setempat (Ibrahim et al. 2020). Efek samping dari persepsi dasar yang dibuat oleh para analis hingga saat ini menunjukkan bahwa kekhawatiran dan pandangan penduduk dan keadaan kota adalah masalah utama dalam perbaikan kota. Memikirkan masalah sebenarnya untuk jaringan kota yang berpendapat bahwa penduduk

tertinggal dan perbaikan tidak cukup cepat. Ini memengaruhi latihan moneter penghuni pada area pedesaan.

Perekonomian kota dapat didorong untuk menjadi lebih berkembang melalui upaya-upaya yang dilakukan usaha kota di disusun untuk mengembangkan kemampuan kota lingkungan terdekat. Hal ini karena kawasan usaha bisnis akan mempercepat pendampingan pemerintah daerah dan menjadi salah satu metodologi dalam mengembangkan perekonomian kota. Dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan kota guna meningkatkan penguatan wilayah kota, maka Perda ini juga membuka pintu bagi kota-kota untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) merupakan entitas atau komponen. keuangan di area kota & merupakan badan penegak yang sah. substansi dan dibentuk dan memiliki tempat dengan Pemerintah Kota, mengawasi keuangan secara bebas dan ahli dengan semua atau sebagian besar modal menjadi sumber daya kota terisolasi. Sementara itu, menurut Meijer, tujuan menjadi unsur yang berbadan hukum adalah agar BUMDes memiliki kebebasan dan komitmen. Ini bisa menjadi tugas yang menantang bagi Dinas Kota untuk dapat memahami pentingnya BUMDes bagi setiap penduduk Indonesia. Ujian lainnya adalah agar kepala kota di Indonesia memahami dan mengelola program BUMDes secara efektif untuk mencapai tujuan utama BUMDes dalam menggerakkan perekonomian kota. (Pradani 2020).

Kehadiran BUMDes di setiap kota diharapkan dapat menambah perluasan jenis pendapatan asli kota yang dapat memberdayakan kota untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan bantuan pemerintah terhadap jaringan

kota idealnya dan BUMDes akan tetap berada sebagai lembaga keuangan kota yang berperan penting. bagian dalam memahami bantuan pemerintah daerah setempat, kota dan pemerintah kota. . Penguasaan administrasi yang baik tentang aturan tata letak BUMDes pada aturan dan pedoman adalah hal yang sangat penting agar BUMDes dapat berjalan dengan baik. Akibatnya, kegiatan di BUMDes yang ahli dan sangat prioritas bagi upaya menggarap ekonomi kelurahan dan kewilayahan dalam lingkup ekonomi kerakyatan (Utami et al. 2019).

Mengingat penggambaran di atas, penulis tertarik untuk lebih berkonsentrasi jauh tentang judul “Analisis Pengelolaan Keuangan usaha yang dimiliki (BUMDes) di Desa Bajimkinasa Kelurahan Rilau Ale rezim Bulukumba”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar yang diuraikan, demikian masalahnya akan dibahas pada pemeriksaan ini :

1. Apakah Pengelolaan eksekusi Keuangan usaha yang dimiliki (BUMDes) di Desa Bajiminasa Kelurahan Rilau Ale rezim Bulukumba sudah efektif?
2. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kepada Badan Usaha Milik Kota (BUMDes) di kota-kota Bajiminasa Kelurahan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba telah efektif ?
3. Apakah Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada kepada Badan Usaha Milik Kota (BUMDes) di kota-kota Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale rezim Bulukumba sudah efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Sasaran yang ingin dicapai dalam pemeriksaan ini adalah :

1. Bagi menganalisis para eksekutif Kinerja Keuangan usaha yang dimiliki Desa (BUMDes) di Desa Bajiminasa Kelurahan Rilau-Ale Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk membedah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kepada Badan Usaha Milik Kota (BUMDes) di kota-kota Bajiminasa Kelurahan Rilau-Ale rezim Bulukumba.
3. Untuk menganalisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten Bulukumba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bajiminasa, Desa Rilau-Ale.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat riset antara lain:

1. Manfaat belajar:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dan menjadi sumber informasi.Keuntungan Akal Sehat:

2. Untuk Ilmuwan

- a. Keuntungan dapat dipelajari dalam komposisi logis yaitu dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.

- b. Untuk Perguruan Tinggi

Penulisan logis seharusnya berubah menjadi bahan perpustakaan untuk peneliti selanjutnya, terutama bagi mahasiswa yang mempunyai minat

dengan kajian mengenai pemeriksaan tata usaha keuangan badan usaha milik daerah (BUMDes)

c. Bagi Instansi

Untuk mengetahui cara mengelola dan mengatur Keuangan Badan Usaha Milik kota (BUMDes) sekaligus bahan pertimbangan untuk menjalankan organisasi kota guna meningkatkan kemajuan desa.

E. Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Eksplorasi ini merupakan salah satu jenis pemeriksaan pemikat kuantitatif, yaitu penelitian yang diarahkan pada faktor-faktor bebas, yaitu tanpa membuat korelasi, atau berinteraksi dengan faktor-faktor yang berbeda. Motivasi di balik pemeriksaan grafis adalah untuk membuat penggambaran, gambar, dan gambar yang metodis, dapat diverifikasi, dan tepat sehubungan dengan realitas saat ini, atribut, dan hubungan antara berbagai kekhasan yang dieksplorasi. Kajian ini bertujuan untuk membedah penatausahaan penyajian keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Bajiminas, Kawasan Bir Rilau, Bulukumba.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk bekerja dengan pemahaman, pencipta memisahkannya menjadi tiga bagian dengan penggambaran yang menyertainya:

Presentasi Bagian I

Bagian ini merupakan bagian dasar yang menggambarkan landasan masalah, definisi masalah, poin-poin dan manfaat pemeriksaan, jangkauan eksplorasi dan percakapan yang efisien.

Bagian II Survei Penulisan

Bagian ini terkait dengan pemahaman-pengertian desa, pengelolaan keuangan desa, kinerja keuangan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), investigasi proporsi moneter teritorial, eksplorasi masa lalu, prospek, dan spekulasi.

Bagian III Filsafat Eksplorasi

Bagian ini berisi strategi penelitian, yang berisi bidang penelitian, jenis dan sumber informasi, prosedur pengumpulan informasi dan metode penyelidikan informasi, definisi fungsional dan rencana pemeriksaan.

Bagian IV HASIL Eksplorasi DAN Percakapan

Bagian ini berisi tentang konsekuensi pemeriksaan, pengelompokan pembicaraan yang ditunjukkan dengan metodologi, gagasan penjajakan, dan pemaknaan masalah dan titik fokus pemeriksaan, serta percakapan dampak lanjutan yang berbeda. bermacam-macam informasi dan investigasi hasil ini.

Bagian V Menutup

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan, gagasan atau usulan yang disajikan bagi singkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, sehingga masyarakat pedesaan mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berubah seiring dengan perubahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Salah satu langkah untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Sutrisna 2020, keberadaan desa sebagai pilar perekonomian bangsa menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat desa berhasil meningkatkan taraf hidup warganya. Diawali dengan berlakunya UU No. 1, sistem pemerintahan di desa memberikan harapan untuk tumbuh dan terciptanya program-program kesejahteraan. 06 Tahun 2014 yang mengubah sistem pemerintahan desa selain secara kelembagaan, telah banyak merubah sistem pemerintahan desa. Desa kemudian berkembang menjadi pemerintahan dengan sumber daya yang besar untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kebijakan pemerintahan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 dianggap sebagai kebijakan yang menawarkan harapan baru. Menurut Kinasih, Widiyahseno, dan Wahjuni DJ 2020, beberapa kebijakan tersebut antara lain alokasi anggaran yang cukup besar ke desa dengan maksud untuk meningkatkan anggaran desa untuk pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan pemerintahan desa dalam Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014. Ada empat macam desa di Indonesia yaitu:

- 1) Jenis desa pertama dan tertua di Indonesia adalah masyarakat berpemerintahan sendiri yang dikenal sebagai desa adat. Jenis desa ini mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Itu biasanya tertutup untuk perkembangan dari dunia luar, dan juga tidak melakukan tugas administratif apa pun yang diberikan negara. DesasPekraman di Bali merupakan gambaran desa tradisional.
- 2) Kota Berwibawa (pemerintahan negara lingkungan) penting bagi wilayah organisasi negara, bagian yang paling rendah adalah memberikan organisasi kepada wilayah lokal, kota ini dibingkai oleh negara dan menyelesaikan tugas-tugas manajerial yang diberikan oleh negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.

- 3) Desa Otonom sebagai Prinsip desentralisasi digunakan untuk membangun pemerintahan daerah sendiri, memberikan desa ini kewenangan yang jelas atas pengelolaan rumah tangga.
- 4) Desa yang bersifat adat dan semi otonom disebut desa campuran. mempunyai kewenangan sebagian yaitu antara otonomi asli dan semi independensi formal Maksudnya diakui oleh undang-undang, tetapi cara pelaksanaannya antara pemerintah Dalam teori desentralisasi, transisi dari daerah otonom ke bagian sub-pemerintah tidak diakui. Desa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU 32 Tahun 2004 merupakan tipe desa campuran semacam ini (Rofidah 2019).

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Financial Management Behavior berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seseorang mengenai bagaimana mengendalikan uang mereka. Proses pengelolaan keuangan seseorang dan aset lainnya dengan cara yang dianggap produktif disebut tanggung jawab keuangan. Pengelolaan uang menurut Ida dan Dwinta (2010) adalah proses penguasaan cara menggunakan aset keuangan. Jika Anda mengelola uang Anda dengan baik, Anda tidak akan terjebak dalam perilaku keinginan yang tak ada habisnya. Dampak dari aktivitas seseorang terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatan yang diperoleh adalah munculnya perilaku pengelolaan keuangan.

Menurut Anwar Ph.D (2019, hal 5) menyatakan bahwa “manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.(Ekonomi et al. 2020).

Yushita menegaskan (2017: 14) Dia mengatakan bahwa salah satu keterampilan paling mendasar yang dibutuhkan masyarakat modern adalah kemampuan mengelola keuangan sendiri karena pilihan yang diambil orang setiap hari akan memengaruhi keamanan finansial dan standar hidup mereka. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan dapat mengakibatkan kesulitan keuangan.

Tingkat literasi keuangan terkait erat dengan manajemen keuangan. Diharapkan dengan pengelolaan keuangan yang baik dan literasi keuangan, taraf hidup masyarakat akan meningkat. Sekalipun seseorang berpenghasilan tinggi, akan sulit untuk memiliki keamanan finansial tanpa pengelolaan keuangan yang baik. Menurut Yushita (2017:13), literasi keuangan merupakan syarat mendasar untuk menghindari masalah keuangan. Diharapkan masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat menikmati hidup dengan sumber keuangan yang tepat (Putri et al.). 2019).

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkakan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Batas waktu ditetapkan dengan prinsip tahunan. berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau aturan yang menetapkan bahwa setiap gerakan administrasi keuangan kota harus bertanggung jawab masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangandesesa.
7. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa

dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.

9. Asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi siapa pun.
10. Asas value for money, yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Asas kejujuran yang menekankan bahwa dana masyarakat termasuk APBDes harus dikelola secara jujur dipercayakan kepada petugas memiliki integritas dan elektabilitas yang baik sehingga potensi munculnya praktek Nepotisme, kolusi, dan korupsi bisa dikurangi.
12. Asas atau asas yang memerlukan pengawasan pengeluaran dan penerimaan adalah asas pengendalian. anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga bila ada perbandingan (varians) dapat segera kita mencari masalah timbulnya selisih itu
13. Konsep organisasi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan Masyarakat harus patuh kepada hukum dan peraturan yang berlaku

14. Asas bertanggung jawab yaitu asas atau asas wajib kepada penerima amanah atau penerima mandate untuk bertanggungjawabkan pengelolaan dan manajemen sumber daya dan pelaksanaan kebijakan pada kepercayaan kepadanya dalam guna mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan.

15. Asas atau asas yang menekankan perlunya keseimbangan dalam pembagian wewenang dan pendanaannya, serta keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif, dikenal dengan asas keadilan.

16. Asas kepatutan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan proporsional dan wajar.

17. Asas atau asas yang menyatakan bahwa dana desa harus digunakan atau diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dikenal dengan asas manfaat bagi masyarakat.

Keuangan desa harus dikelola sesuai dengan berbagai prinsip pengelolaan keuangan agar dana yang sangat terbatas dapat digunakan secara efektif, ekonomis, dan berkeadilan. Agar efektif, pengelolaan keuangan desa harus mampu mencapai tujuan secara efisien., maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandinganterbaikantara masukan dengan nilaimas

ukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Sejak 1 Januari hingga 31 Desember, sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti APBN dan APBD. Sebagai kepala pemerintahan desa, Kepala Desa berwenang atas keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa di desa. kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan.

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
3. Menetapkan bendahara desa.
4. Menetapkan pejabat yang bertanggung jawab mengumpulkan dana desa.
5. Menetapkan petugas untuk bekerja menguasai barang milik desa.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pengawas dengan dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yaitu perangkat desa lainnya dan sekretaris. Sekretaris desa melapor kepada kepala desa dan berfungsi sebagai koordinator pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa bertanggung jawab atas kas.. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa (Sari 2020).

Pengelolaan Dana Desa mencakup tiga tindakan penting: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

- a. Perencanaan Langkah pertama dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perencanaan. Latihan perencanaan ini selesai untuk

menyusun kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (mencakup tiga tindakan penting: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan Langkah pertama dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perencanaan. Latihan perencanaan ini selesai untuk usulan-usulan masyarakat terhadap program kedepannya saja yang akan dilakukan di tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014).

Pelaksanaan Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa) bertugas melaksanakan seluruh aspek pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD). Setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) wajib menyertakan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan untuk mendorong transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Muatan tersebut pada dasarnya memuat nama gerakan, volume aksi, 18 rencana keuangan yang dirangkum dari Penunjukan Aset Kota (ADD) serta pengembangan diri daerah setempat, dan jam pelaksanaan latihan sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Penataan dan Kemajuan Kota (Musrenbangdes) (Diansari, 2015).

Pertanggungjawaban Kepala Desa wajib menyampaikan laporan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab, wewenang, hak, dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan desa. Laporan tersebut ada yang dikirim ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ada yang dikirim ke Bupati/Walikota, yang sifatnya tahunan dan semesteran.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan Kualitas dan kuantitas pekerjaan dapat dicapai oleh seorang pegawai dengan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Kinerja seorang karyawan sebagai seorang karyawan diukur terhadap serangkaian standar khusus pekerjaan tertentu. (Hardiyanti Kamaruddin, D., Haeruddin, M. A., Iryansyah, M. R., Mubarak, A., Pekei, M., Mardjuni, S., ... & Said, M. (2021) . Tingkat pencapaian suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dikenal dengan kinerja keuangan daerah. Diukur dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui kebijakan sebelumnya dengan maksud untuk menentukan kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Dalam kerangka APBD yang dimaksud dengan “keuangan daerah” adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan dikelola oleh pemerintah daerah. Termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah (Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Pemerintah daerah sepenuhnya bertanggung jawab baik keuangan daerah secara keseluruhan maupun pengelolaan APBD pada khususnya. Kuswandi (2016) mendefinisikan keuangan daerah sebagai “semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang” dan “segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki oleh daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Hak dan kewajiban ini dapat dinilai dengan uang.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi dan dituangkan dalam SAPBD yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Pasal 4 Tahun 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Syamsi (1986) dalam Giftovel Rondonuwu (2016), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Tingkat pencapaian suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran disebut kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Sari. (2016). Rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dapat digunakan untuk mengevaluasi

kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Masdiantini dan Erawati (2016). Kemandirian pemerintah daerah menunjukkan kapasitas mereka untuk membiayai operasi pemerintah mereka sendiri dengan pendapatan daerah. Jumlah uang yang dihemat oleh pemerintah daerah dapat dilihat dalam perekonomian. Tingkat pendapatan yang dapat dihasilkan oleh pemerintah daerah diukur dari efektivitasnya. Efisiensi menunjukkan berapa banyak biaya untuk menghasilkan pendapatan. Analisis rasio keuangan adalah salah satu metode yang paling umum untuk menganalisis laporan keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

4. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio adalah salah satu penelitian terhadap peristiwa atau kejadian dengan menggunakan pertimbangan antara dua aspek atau lebih yang hasilnya dijelaskan melalui angka. Untuk mengidentifikasi tren, analisis rasio keuangan APBD membandingkan hasil satu periode dengan periode sebelumnya. Selain itu, Anda bisa dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio moneter dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah terdekat lainnya ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Analisis rasio keuangan sendiri adalah perbandingan dua angka atau lebih yang informasinya berasal dari laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2016), tren kinerja dapat disimpulkan dari analisis rasio keuangan.

Adapun beberapa cara untuk mengatur Pemanfaatan rasio kinerja keuangan daerah merupakan salah satu strategi pengelolaan kinerja keuangan. beberapa rasio yang dapat digunakan yaitu :

1. Rasio Profitabilitas merupakan kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan laba dalam satu periode tertentu (1 tahun) dengan menggunakan rasio kemampuan dasar. Dalam mengukur tingkat profitabilitas Badan Usaha Milik Desa, salah satu yang dapat digunakan ialah pengukuran rasio ROE(*Return On Equity*). Rasio ini menunjukkan berapa persen perolehan laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar semakin baik. Rumus dalam menentukan Rasio Pengembalian Atas Modal (*Return On Equity*) dapat dilihat di bawah ini:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat efektivitas keuangan daerah dapat di lihat pada table:

Tabel 1.1
Penilaian Efektivitas

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	25.16%
2	Baik	10.80%
3	Kurang Baik	9.6%
4	Tidak Baik	< 9%

Lukviarman (2016:36)

2. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan BUMDES dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Dengan menganalisis rasio tersebut, pemilik usaha dapat dengan mudah melihat atau menilai kemampuan manajemen dalam mengelola dana/anggaran yang telah dipercayakan. Rasio yang digunakan peneliti dalam mengukur likuiditas BUMDES yaitu *Current Ratio*. *Current Ratio* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan BUMDES dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menghadapi kesulitan. Berikut rumus yang digunakan dalam mengukur rasio lancar (*Current Ratio*):

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat kemandirian keuangan daerah dapat di lihat pada table:

Table 1.3
Penilaian Kemandirian

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	175% - 200%
2	Baik	150% - 174%
3	Kurang Baik	101% - 149%
4	Tidak Baik	< 100%

Harahap (2010:201)

3. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah usaha untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila usaha tersebut

dilikuiditas atau dibubarkan. Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Debt to Equity Ratio*. *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas.

Rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Berikut rumus untuk mengukur *Debt to Equity Ratio* :

$$DER = \frac{\text{Hutang Lancar}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat efisiensi keuangan daerah dapat di lihat pada table:

Tabel 1.2
Penilaian Efisiensi

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	31% - 40%
2	Baik	21% - 30%
3	Kurang Baik	11% - 20%
4	Tidak Baik	< 10%

Harahap (2010:201)

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Definisi BUMDes menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 Bisnis yang Dimiliki keenam Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, merupakan usaha yang seluruh /sebagian besar asset yang berasal oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Rifa'i et al., salah satu definisi BUMDes adalah (2006) Badan Usaha Milik Daerah merupakan lembaga kelurahan/desa yang didirikan melalui ketetapan aturan yang ditetapkan merupakan lembaga keuangan yang berbasis kepada kegiatan sosial dengan ciricirinya sebagai lembaga keuangan tersebut yang dikelola dengan prinsip kebersamaan dan dikelola dengan menggunakan prinsip keuangan resmi. Pendirian BUMDes dibahas pada Bab II Pasal 2 Permendes No 4 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan untuk Menampung upaya seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dikelola oleh Desa atau melalui kerjasama antar Desa.

BUMDesa wajib memelihara catatan tertulis atau pembukuan secara sistimatis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi, dan tujuan akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDesa adalah pengelola dan dewan komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah bank, komunitas yang menawarkan penyertaan modal, pemerintah kabupaten, dan petugas pajak. Secara umum tujuan dilakukannya pembukuan adalah:

- a) Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur permodalan.

- b) Untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa dihindari.
- c) Untuk mengetahui keadaan terkini dari penyediaan barang dan jasa sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi manajemen persediaan. Pada unit usaha dagang yang disebut persediaan adalah barang dagangan, pada unit usaha industri adalah persediaan bahan mentah, barang dalam proses, maupun barang jadi, sedangkan pada unit simpan pinjam adalah persediaan uang.
- d) Untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana BUMDesa, sehingga bisa mengevaluasi kinerja keuangan BUMDesa seperti likuiditas, solvabilitas maupun rentabilitas perusahaan.

Harta dalam pengertian akuntansi adalah semua barang dan hak milik perusahaan (BUMDes) dan sumber ekonomi lainnya. Harta BUMDesa dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Harta Lancar Harta lancar atau umumnya disebut aktiva lancar adalah uang kas/didalam tempat menabung atau aset lain dapat segera dicairkan digunakan aset, yang termasuk didalam kelompok Kas, piutang, pendapatan yang akan diterima, dan biaya dibayar di muka adalah contohnya., persediaan, perlengkapan.
2. Harta Tetap Umumnya disebut sebagai aktiva tetap adalah semua harta yang dimiliki BUMDes untuk menjalankan usahanya, misalnya BUMDes membeli tanah dan membangun gedung untuk memulai usahanya. Untuk barang-barang yang mengalami keausan biasanya

dibuat biaya penyusutan, tujuannya agar untuk memperoleh Badan usaha (BUMDes) sudah punya cukup uang.. Besarnya penyusutan ditetapkan berdasarkan perkiraan usia gigi yang dimiliki (5-10 tahun) dan perkiraan atau estimasi tingkat kenaikan harga pada masa mendatang.

3. Harta Tidak Berwujud Adalah harta yang dimiliki perusahaan (BUMDes) tetapi tidak nampak, harta ini merupakan hak istimewa atau sesuatu yang menguntungkan dari bisnis yang dijalankan. Misalnya, BUMDes mampu menghasilkan jenis makanan sehat yang tahan lama untuk semua usia. Maka produk itu dimintakan hak paten agar memperoleh perlindungan dari pemerintah.

Klasifikasi Jenis usaha BUMDes diatur dalam pasal 19 permendesa No 4 Tahun 2015. BUM Desa dapat menjalankan usaha sosial semata yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha dalam BUMDesa sebagai mana dimaksud dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :

- a) Air minum kelurahan;
- b) Perusahaan listrik di desa; Lumbung pangan; dan
- c) Sumber daya dan teknologi yang bersifat lokal.

Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 pasal 21 disebutkan bahwa BUM Desa dapat dijalankan usaha perantara (oleh brokering) di memberikan jasa pelayanan kepada warga, unit usaha dalam

BUMDes sebagaimana yang dimaksud dapat menjalankan usaha perantara meliputi:

- a) Jasa pembayaran listrik
- b) Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
- c) Jasa pelayanan lainnya.

Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa, yang pada Modal BUMDes terdiri atas Penyertaan modalvDesa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

Penyertaan modal Desa dijelaskan pada pasal 18 sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- b) Bantuan Pemerintah, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d) Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Sedangkan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada Perda Kabupaten Gresik berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. Terdapat prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDesa yaitu :

- 1) Koperasi: agar BUMDes tumbuh dan bertahan, setiap komponen harus dapat bekerja sama dengan baik. Partisipatif, Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 2) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 3) Transparan, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 4) Akuntabel, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 5) Suistanabel, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Terkait pengelolaan Bumdes, telah tercantum dengan jelas dan secara detail dalam permendesa No. 4 Tahun 2015. Strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap

dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a) sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes;
- b) pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes
- c) pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting)
- d) Analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting). mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e) pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosialekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f) diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

Karakteristik BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Berbentuk badan hukum

2. Berusaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur, dan perdagangan)
3. Modal terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan
4. Masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%
5. Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa
6. Menjadi salah satu sumber pendapatan desa
7. Memberikan layanan pada masyarakat

Pendirian Badan Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan bekerjasama dengan desa lain. Artikel tentang Dik dalam 3 permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga kelima Menggunakan jaringan pasar untuk menciptakan peluang yang memenuhi kebutuhan layanan dasar warga negara
5. Membuka lapangan kerja dan pemerataan ekonomi

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum, pertumbuhan desa
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan (Siagian 2021).

B. Penelitian Terdahulu

Table 1.4

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Monalisa, Ibrahim tahun 2020	Pengaruh Manajemen Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.	Deskriptif Kuantitatif	Nilai t hitung t tabel penelitian ini atau 9,436 1683 menunjukkan bahwa pengaruh pengelolaan BUMDES tergolong “berpengaruh” dengan nilai sebesar 62,12%. Partisipasi (67%) dan sumber daya manusia (64%) merupakan faktor yang berpengaruh

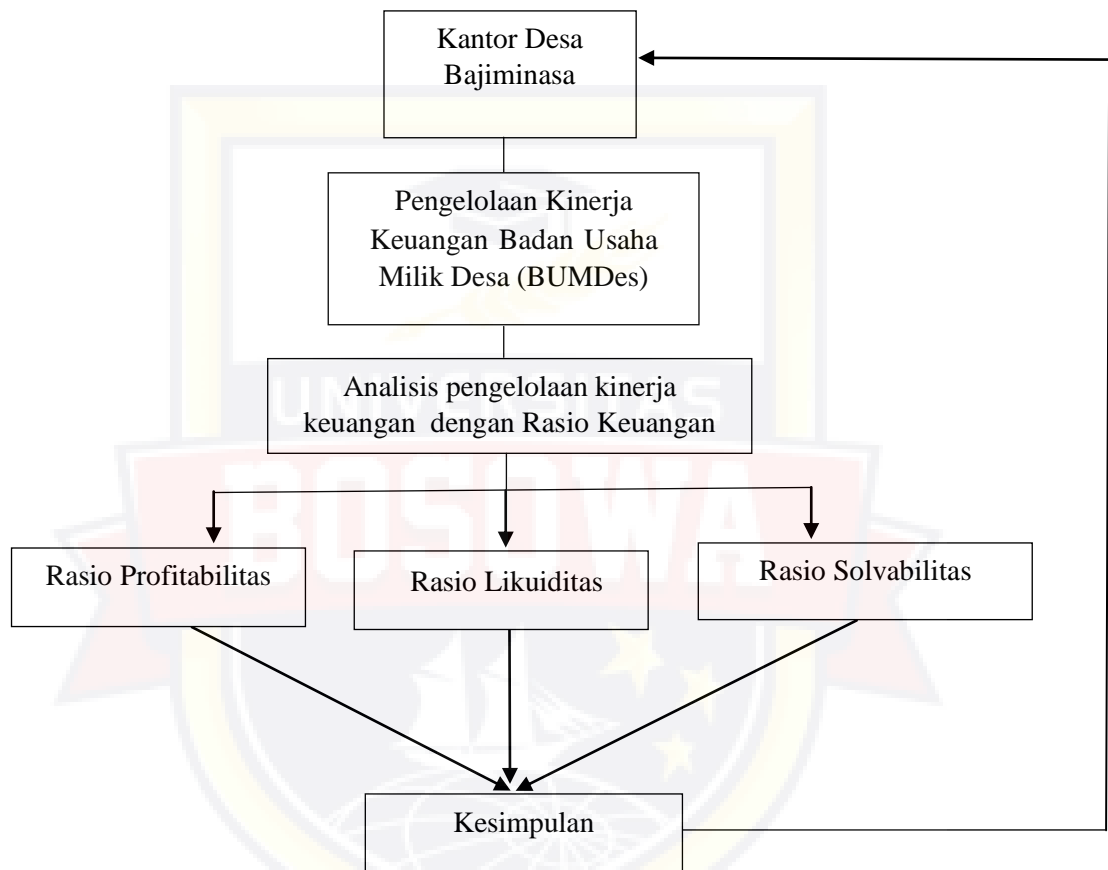
				<p>terhadap pengelolaan BUMDes, dengan hasil kumulatif sebesar 65,5 persen atau dikategorikan “berpengaruh”. Dengan perolehan sebesar 50,02%, pengelolaan BUMDes di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan kurang berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat.</p>
2	Inten, Kinasih tahun 2020	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat ekonomi masyarakat.	Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder	<p>Menurut temuan penelitian ini, upaya BUMDes “Mekar Sari” terlihat jelas dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang dibuktikan dengan Rp. Rp. Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Morosari Tahun 2017 sebesar 9.264.000,00 atau lebih kurang 0,064% dari PAD Desa Morosari apabila persentasenya menerima keuntungan. Meskipun persentase ini masih belum mencukupi dibandingkan Pendapatan Asli Desa</p>

				lainnya, namun cukup besar. Desa Morosari kini sudah mandiri dan tidak selalu mengandalkan Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD), padahal kontribusi BUMDes “Mekar Sari” tidak berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa.
3	Rofidah, Naily tahun 2019	Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gondowangi Dalam Pengelolaan Keuangan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang	kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Temuan penelitian dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Gondowangi masih lugas.
4	Siagian, Ade Onny. Tahun 2021	Analisis Pertumbuhan Usaha Milik Desa Harapan Oesena (Bumdes) di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang.	Penelitian kasus dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan peraturan perundang-undangan dan pendekatan deskriptif kualitatif	Dampak lanjutan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan BUMDes di Kota Oesena masih belum stabil
5	Sari, Betha Rahma tahun (2020)		kasus dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan peraturan perundang-undangan dan pendekatan deskriptif kualitatif	Konsekuensi dari tinjauan tersebut adalah bahwa strategi yang ditegaskan dari Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota jelas mempengaruhi kelangsungan hidup pemerintahan.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada kerangka teori dan landasan penelitian, dapat digambarkan pada konsep penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



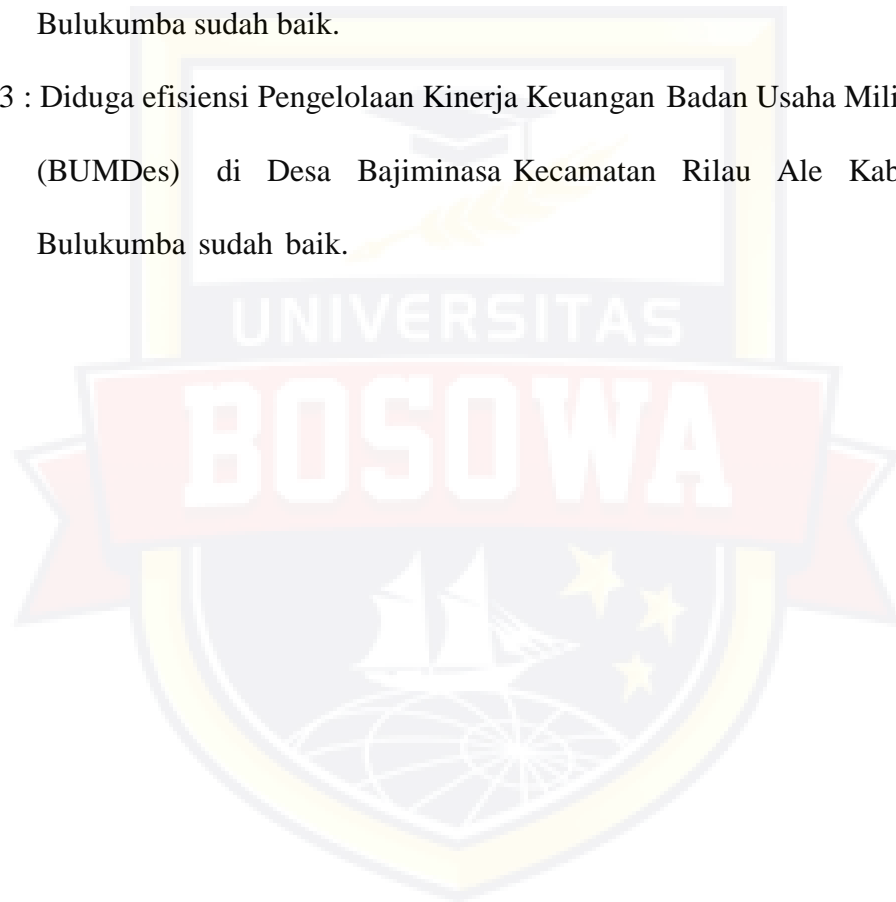
D. Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan di teliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.

H1 : Diduga efektifitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sudah baik.

H2 : Diduga kemandirian Pengelolaan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sudah baik.

H3 : Diduga efisiensi Pengelolaan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sudah baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Bajiminasa, kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian ini terhitung sejak awal pelaksanaan seminar dinyatakan lulus dan telah mendapat rekomendasi penelitian dari dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

B. Populasi dan Sam`pel

1) Populasi

Sugiyono (2016 : 80) mengemukakan bahwa “ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya." Berdasarkan simpulan di atas bisa disimpulkan bahwa populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk diteliti dan dipelajari untuk kemudian disimpulkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pada kantor Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 2020-2022.

2) Sampel

Menurut Sugiyono (2016 : 81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.” Pengukuran sampel merupakan suatu Langkah untuk

menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua missal karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Berdasarkan defenisi, bahwa sampel adalah Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada Kantor Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 2020-2022.

C. Instrument Penelitian

Insrumen penelitian menurut Arikunto (2019) adalah alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Disamping itu, adanya instrumen penelitian juga akan membantu pengerjaan penelitian lebih sistematis dan data yang didapatkan pun lebih mudah untuk diolah. Adapun instrument yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi untuk mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah, data kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas, sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif dikemukakan oleh Sugiyono

(2018 : 13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian merupakan angka-angka yang akan diukur menggunakan statistic sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a) Data primer

Menurut Sugiyono (2018 : 456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpul sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018 : 456) Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017 : 194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, menurut Kriyantono (2018) adalah percakapan antara periset, yaitu seseorang yang berharap mendapatkan informasi, dan informan, yaitu seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek.
2. Kuesioner, menurut Sugiyono (2019:199) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
3. Observasi, Nasution (dalam Sugiyono. 2020 : 106) mengemukakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi yang dikumpulkan dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih.

F. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, peneliti mencari fakta dan mengumpulkan data-data untuk menganalisis secara benar dan tepat, sehingga mampu memberikan keterangan yang lengkap terhadap masalah yang dihadapi. Adapun tahapan-tahapan teknik analisis data sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Bajiminasa tahun 2020-2022.
- 2) Menghitung rasio keuangan Kantor Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale

$$\text{➤ } \textit{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

$$\text{➤ } \textit{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

$$\text{➤ } DER = \frac{\text{Hutang Lancar}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

- 3) Menganalisis dan membahas pengelolaan Kinerja keuangan Kantor Desa Bajiminas Kecamatan Rilau Ale dengan indikator yang sesuai dengan teori.
- 4) Menarik kesimpulan.

G. Defenisi Operasional

Definisi operasional penelitian yaitu sebuah definisi berdasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari yang didefinisikan atau mengubah konsep dengan kata-kata yang menguraikan perilaku yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh seseorang.

- 1) Pengelolaan keuangan adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam meranvang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan serta pengendalian dan dan aset.
- 2) Kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.
- 3) Analisis rasio keuangan daerah adalah salah satu penelitian terhadap peristiwa atau kejadian dengan menggunakan pertimbangan antara dua aspek atau lebih yang hasilnya dijelaskanvmelalui angka.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Garis Besar Kota BUMDES Bajiminasa, Kawasan Bir Rilau, Peraturan Bulukumba.

1) Sejarah

Desa Bajiminasa adalah perekeran dari desa bonto bangun pada tahun 1987 sekaligus penunjukan kepala desa atas nama ANDI MALLOMBASSI AWAL MULA TERBENTUKNYA DESA BAJIMINASA mulai dari desa persiapan selama 2 Tahun yaitu dari Tahun 1987 sampai 1989, setelah 2 tahun baru masuk status desa definitif. Desa Bajiminasa terdiri dari 3 dusun di antaranya Dusun Pandang-pandang dengan kepala dusun atas nama MANSUR HB, Dusun Batu Tompo dengan kepala susun atas nama M. BASRI, Dusun Palipungan dengan kepala dusun atas nama M. BAHAR ANDI MALLOMBASSI Kepala desa pertama di desa Bajiminasa menjabat kepala desa selama 1 priode. Setelah itu jabaran kepala desa di jabat oleh bapak AGUING BENNUASE S.PD selama 2 Periode. Pada tahun 2013 pemilihan kembali kepala desa dan dijabat oleh bapak H. JUFRI selama I Periode. Pada tahun 2020 kembali perilihan kepala desa dan yang terpilih adaiiah bapak ANSHAR ARSYAD. Yang menjabat sampai sekarang atau periode 2020 Sampai 2026. Pada tahun 2017 diadakan pemekaran dusun dari 3 dusun menjadi 5 dusun yang diantaranya : Dusun Sapepe, Dusun Batu Tompo, Dusun Bonto Baju, Dusun Palipungan, Dusun Pandang-pandang

2) Lokasi

Desa Bajiminasa ini merupakan kota yang terdiri dari 5 vila, khususnya Dusun Bonto Baju, Dusun Batu Tompo, daerah Sapepe, daerah Pa'lipungan, & daerah Pandang-Pandang. Dari 5 Dusun ini masing-masing memiliki 2 RK dan setiap RK memiliki 2 RT. Ada beberapa perbatasan antara dusun diantaranya yaitu Dusun Batu Tompo berbatasan Dengan Dusun Sapepe, daerah Bonto Baju, daerah Pa'lipungan, & daerah Pandang-Pandang. Daerah Sapepe berbatasan dengan Dusun Batu Tompo dan Dusun Pandang-Pandang. Dusun Pandang-Pandang berbatasan dengan Dusun Batu Tompo dan Dusun Sapepe, Dusun Pa'lipungan berbatasan dengan Dusun Batu Tompo dan Dusun Bonto Baju. Dan yang terakhir adalah Dusun Bonto Baju berbatasan dengan Dusun Batu Tompo dan Dusun Pa'lipungan. Dari perbatasan dusun ini dapat kita lihat bahwa Dusun Batu Tompo merupakan dusun yang memiliki wilayah paling luas.

3) Luas wilayah

Desa Bajiminasa memiliki luas wilayah 955 km/2.

4) Total penduduk

Total penduduk Kota Bajiminasa adalah 1856 penduduk laki-laki dan 2015 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah keluarga yang ada di Desa Bajiminasa yaitu 1106 KK (Kartu Keluarga).

5) Sumber Daya Alam

Penduduk Desa Bajiminasa umumnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar meskipun bahasa daerah. Dialek provinsi yang

digunakan daerah setempat adalah bahasa Bugis dan Konjo dengan bahasa Makassar, keduanya merupakan dialek pedoman dalam iklim kekeluargaan dan khususnya di daerah pedesaan. Rejim ini memiliki suhu tipikal mulai dari 23,82 °C - 27,68 °C .Suhu pada kisaran ini sangat wajar untuk budidaya tanaman pangan dan tanaman perkebunan, sehingga karakterisasi lingkungan di Rejim Bulukumba termasuk lingkungan yang lengket atau sedikit basah. Peraturan Bulukumba berada di wilayah timur, musim gadu pada bulan Oktober hingga Musim Semi dan musim rendengan pada bulan April hingga September.

6) Pendapatan masyarakat

Pendapatan masyarakat desa bajiminasa ada di sektor formal dan sektor informal

1. Visi dan Misi

Penglihatan

VISI yayasan BUMDes REZKI MULIA adalah : “Memahami bantuan pemerintah kepada masyarakat Kota Bajiminasa melalui peningkatan ikhtiar keuangan dan administrasi sosial, dengan peribahasa “MARI BERSAMA Kota Binaan”

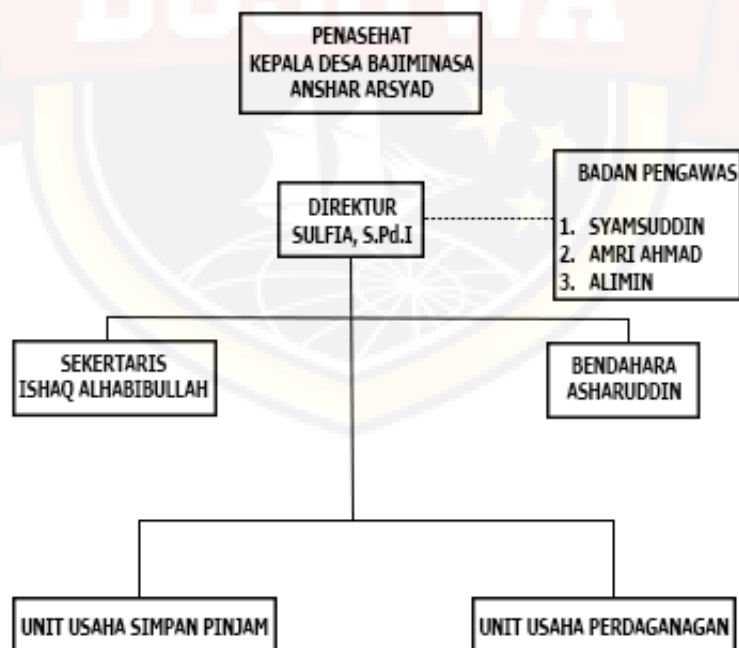
Misi

- 1) Peningkatan organisasi moneter melalui dana investasi dan organisasi lanjutan dan organisasi daerah asli
- 2) Peningkatan administrasi sosial melalui kerangka pensiun yang dikelola pemerintah untuk keluarga tidak mampu

- 3) Peningkatan kerangka fundamental provinsi yang menopang perekonomian negara
- 4) Menumbuhkan organisasi partisipasi keuangan dengan pertemuan yang berbeda
- 5) Mengawasi dukungan program yang masuk ke kota-kota melalui pencadangan bergilir, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemelaratan dan peningkatan bisnis keuangan pedesaan.

1. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2. Struktur Organisasi



a. Daftar Sumber Daya Manusia dan Fungsi

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>
ANSHAR ARSYAD	:Penasihat
SYAMSUDDIN	:Pengawas
SULFIA,S.Pd.I	:Ketua
ISHAQ ALHABIBULLAH	:Sekretaris
ASHARUDDIN	:Bendahara

b. Kegiatan Usaha

a) Simpan Pinjam

Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan para pelaku UMKM di Desa Bajiminasa dengan memberikan kemudahan akses ke layanan keuangan dengan memberikan pinjaman untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, dan mengajari mereka cara mengelola pinjaman dan menggunakannya dengan benar.

b) Perdagangan

Bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan mempermudah akses memperoleh kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan para petani di desa Bajiminasai.

c) Penyewaan Tenda Terowongan

Peluang pengembangan jenis usaha penyewaan tenda terowongan dengan tujuan menawarkan bentuk bantuan publik ke daerah setempat dengan mendapatkan keuntungan finansial, namun potensi keuntungan umumnya dibatasi karena fakta bahwa kemampuan sosial mereka harus digarisbawahi.

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Dalam memperkirakan presentasi moneter Town Claimed Endeavours Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba periode 2020-2022. Analisis berpusat pada beberapa proporsi moneter Manfaat, Likuiditas, dan Dissolvabilitas. Berikut ini adalah pameran moneter dari Town Possessed Endeavours setelah menyelidiki ringkasan fiskal, artikulasi untung dan rugi, dan laporan akuntansi periode 2020-2022.

1. Analisis Rasio Profitabilitas

Benefit adalah kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu (1 tahun) dengan menggunakan proporsi kapasitas fundamental. Dalam memperkirakan tingkat keuntungan Usaha yang Diklaim Kota, para ilmuwan menggunakan estimasi proporsi ROE (Return On Value). Proporsi ini menunjukkan tingkat keuntungan bersih mana yang diperoleh bila diperkirakan dari modal pemilik. Semakin besar semakin baik. Persamaan untuk menentukan Untung dari Nilai harus terlihat di bawah ini:

Nilai Pengembalian	=	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}}$	x 100 %
Tahun 2020	=	$\frac{\text{Rp.37.805.000}}{\text{Rp.106.169.000}}$	x 100 %
			= 35,61%
Tahun 2021	=	$\frac{\text{Rp.52.947.800}}{\text{Rp.68.879.000}}$	x100%
			= 76,87%
Tahun 2022	=	$\frac{\text{Rp.32.220.000}}{\text{Rp.49.335.000}}$	x100%
			= 65,31%

Informasi di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Town Claimed Endeavours memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp 37.805.000 dan modal sebesar Rp 106.169.000, sehingga Profit from Value (ROE) sebesar 35,61%,

artinya setiap modal yang digunakan oleh Town Possessed Ventures dapat menghasilkan laba bersih manfaat sebesar 35,61%. Pada tahun 2021 keuntungan bersih yang diperoleh Town Possessed Endeavours adalah sebesar Rp. 52.947.800 dan modal Rp. 68.879.000 maka Profit from Value (ROE) adalah 76,87%, dan itu berarti di tahun 2021, modal apapun yang digunakan oleh Elemen Bisnis Town Possessed dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar 76,87%. Sedangkan pada tahun 2022, keuntungan bersih yang diperoleh Town Possessed Undertakings adalah sebesar Rp32.220.000 dan modal sebesar Rp49.335.000, sehingga Profit from Value (ROE) sebesar 63,31%, dan hal tersebut dimaksudkan agar pada tahun 2022 setiap modal yang digunakan oleh Town Claimed Endeavour dapat menghasilkan manfaat bersih sebesar 63,31%. Informasi terkait Return On Value (ROE) Town Claimed Endeavours terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 5. Return On Equity

Tahun	Keuntungan (Rp)	Aset (Rp)	ROE (%)
2020	Rp.37.805.000	Rp.106.169.000	35,61%
2021	Rp.52.947.800	Rp.68.879.000	76,87%
2022	RP.32.220.000	Rp.49.335.000	65,31%

Sumber informasi diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Profit from Value of Town Claimed Endeavours telah meningkat dan semakin berkurang.

2. Analisis Proporsi Likuiditas

Proporsi likuiditas merupakan proporsi yang menunjukkan kemampuan BUMDES untuk menutupi komitmen sementara. Dengan melihat

proporsi ini, pengusaha dapat dengan mudah melihat atau menilai kemampuan dewan untuk mengelola aset/rencana pengeluaran yang telah dianugerahkan. Proporsi yang terlibat oleh spesialis dalam memperkirakan likuiditas BUMDES adalah Proporsi Berkelanjutan. Proporsi Lancar adalah proporsi yang menunjukkan kemampuan BUMDES untuk melunasinya. Resep berikut digunakan untuk mengukur persentase yang sedang berlangsung:

$$\begin{aligned}
 \text{Proporsi saat ini} &= \frac{\text{Sumber daya saat ini}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100 \% \\
 \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp.109.769.000}}{\text{Rp. 3.600.000}} \times 100 \% \\
 &= 2966,81 \% \\
 \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp.98.879.000}}{\text{Rp.30.000.000}} \times 100 \% \\
 &= 329,60\% \\
 \text{Tahun 2022} &= \frac{\text{Rp.80.990.099}}{\text{Rp.31.655.099}} \times 100 \% \\
 &= 255,85\%
 \end{aligned}$$

Dengan perhitungan di atas, tingkat proporsi berjalan pada tahun 2020 sebesar 2965,81%, sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 329,60%. Karena adanya penurunan sumber daya sebesar Rp. 106.769.000 menjadi Rp. 98.879.000 maka pada tahun 2022 Town Claimed Ventures (BUMDES) akan mengalami penurunan Current Proportion (Sumber Daya Saat Ini) sebesar 255,85%. Pengurangan ini terjadi karena peningkatan sumber daya saat ini dari Rp 30.000.000 menjadi Rp 31.655.099. Informasi di atas, spesialis menyimpulkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Proporsi Saat Ini (Sumber Daya Saat Ini)

Tahun	Aktiva Daya	Kewajiban Lancar	Proporsi Lancar
2020	Rp.109.769.000	Rp.3.600.000	2965,81%
2021	Rp.98.879.000	Rp.30.000.000	329,60%
2022	Rp.80.990.099	Rp.31.655.099	255,85%

Sumber informasi diolah (2023)

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi berjalan (Current Proportion) Badan Usaha Milik Kota (BUMDES) pada tahun 2020 - 2022 adalah 2965,81%, 329,60% dan 255,85%. Informasi tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun proporsi Badan Usaha Milik Kota (BUMDES) yang sedang berjalan berada dalam kondisi yang fluktuatif.

3. Analisis Proporsi Kelarutan

Semua dissolvabilitas adalah proporsi yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bisnis untuk membayar komitmennya, baik saat ini maupun jangka panjang jika bisnis tersebut ditukar atau dihancurkan. Proporsi kelarutan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Obligation to Value Proportion. Proporsi Kewajiban Nilai adalah proporsi yang digunakan untuk mensurvei kewajiban dan nilai. Proporsi ini diperkirakan dengan melihat seluruh kewajiban, menggabungkan kewajiban lancar dengan semua nilai. Berikutnya adalah persamaan untuk memperkirakan Proporsi Kewajiban terhadap Nilai:

$$\begin{aligned}
 \text{Proporsi terhadap nilai} &= \frac{\text{Kewajiban lancar}}{\text{Aset}} \times 100 \% \\
 \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp.3.600.000}}{\text{Rp.106.169.000}} \times 100 \% \\
 &= 3,39\% \\
 \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp.30.000.000}}{\text{Rp.68.879.000}} \times 100 \% \\
 &= 43,55\% \\
 \text{Tahun 2022} &= \frac{\text{Rp.31.655.099}}{\text{Rp.49.355.000}} \times 100 \% \\
 &= 64,16\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan estimasi Proporsi Kewajiban terhadap Nilai, hasil pemeriksaan tahun 2020 menunjukkan bahwa besarnya kewajiban terhadap modal adalah sebesar 3,39%. Pada tahun 2021 menunjukkan besarnya kewajiban terhadap modal sebesar 43,55% dan pada tahun 2022 menunjukkan besarnya kewajiban terhadap modal sebesar 64,16%. Informasi terkait Proporsi Nilai Kewajiban Usaha Milik Kota (BUMDes) tahun 2020 - 2022 dirangkum oleh para analis dalam tabel berikut:

Tabel 7. Debt to Equity Ratio (Utang terhadap Modal)

Tahun	Kewajiban Lancar	Aset	proporsi nilai
2020	Rp.3.600.000	Rp.106.169.000	3,39%
2021	Rp.30.000.000	Rp.68.879.000	43,55%
2022	Rp.31.655.099	Rp.49.335.000	64,16%

Sumber informasi diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Proporsi Nilai Kewajiban Usaha Milik Kota (BUMDes) tahun 2020 - 2022 adalah sebesar 3,39%, 43,55%, dan 64,16%. Informasi tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun derajat Kewajiban terhadap Proporsi Nilai yang diklaim oleh Badan Usaha Milik

Daerah (BUMDes) berada dalam kondisi yang tetap sejak mengalami perluasan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan atau menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam kaitannya dengan pendapatan, total aset dan modal. Jenis rasio profitabilitas yang digunakan peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa adalah Return On Equity (ROE) yang menunjukkan berapa persen laba bersih yang diperoleh jika diukur dari modal dimana semakin besar semakin baik.

Berdasarkan analisis rasio profitabilitas diperoleh rasio pengembalian modal (Return On Equity) Badan Usaha Milik Desa sebesar 59,26%. Secara teoritis, Kasmir (2014) mengemukakan bahwa angka ROE suatu perusahaan dapat dikatakan efektif/sehat jika mencapai rata-rata industri sebesar 40%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rasio Return On Equity, kinerja keuangan BUMDes efektif karena rata-rata rasio Return On Equity di atas 40%.

2. Analisis Proporsi Likuiditas

Investigasi proporsi likuiditas adalah tanda kemampuan bisnis untuk membayar semua komitmen keuangan sementara pada pembangunan dengan menggunakan sumber daya saat ini yang belum dapat diakses. Sebuah bisnis dapat dikatakan lancar jika bisnis tersebut dapat membayar

semua komitmen keuangan sementara dan sebaliknya, bisnis tersebut tidak dapat dikatakan lancar dengan asumsi bisnis tersebut tidak dapat membayar semua keuangan sesaatnya. komitmen.

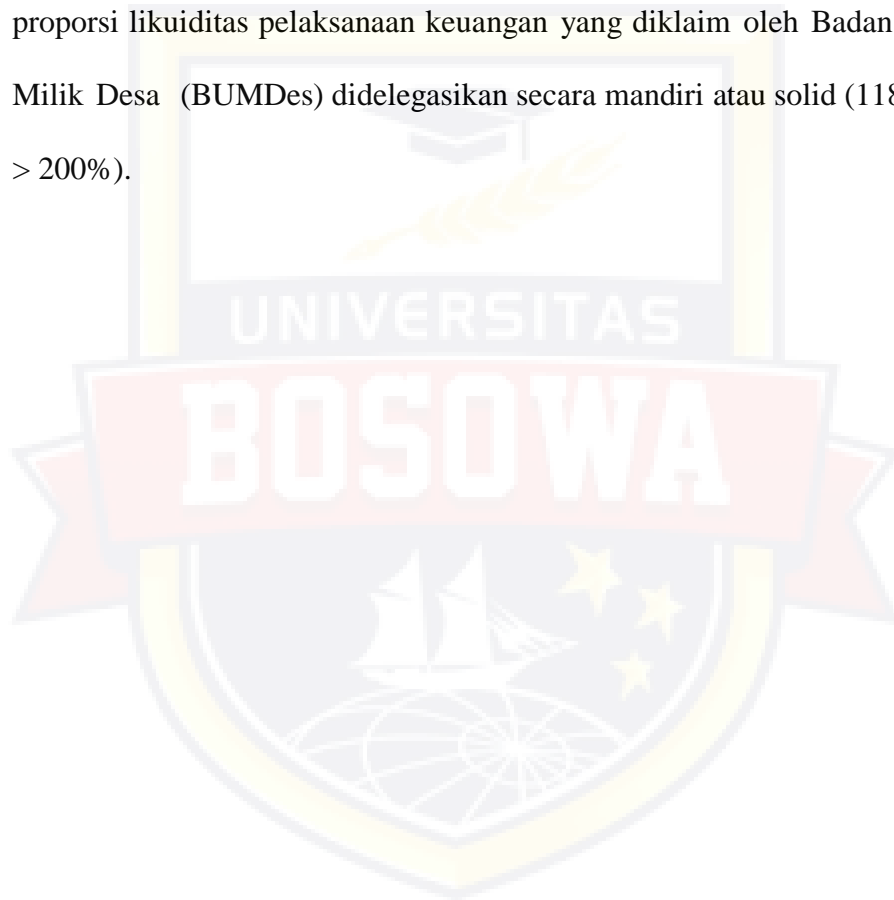
Proporsi likuiditas yang digunakan dalam menggambarkan keadaan penyajian keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2020 - 2022 adalah proporsi berjalan. Semakin tinggi jumlah sumber daya saat ini menyiratkan semakin tinggi tingkat likuiditas organisasi. Proporsi rata-rata Badan Usaha Milik Kota (BUMDes) saat ini adalah 1183,75%. Menurut Harahap (2010: 201), norma yang layak dan solid dari proporsi sumber daya saat ini adalah 200%. Sehingga cenderung beralasan jika dilihat dari proporsi likuiditas pelaksanaan keuangan yang diklaim oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didelegasikan secara mandiri atau solid (1183,75% > 200%).

3. Analisis Proporsi Solvabilitas

Investigasi proporsi likuiditas adalah tanda kemampuan bisnis untuk membayar semua komitmen keuangan sementara pada pembangunan dengan menggunakan sumber daya saat ini yang belum dapat diakses. Sebuah bisnis dapat dikatakan lancar jika bisnis tersebut dapat membayar semua komitmen keuangan sementara dan sebaliknya, bisnis tersebut tidak dapat dikatakan lancar dengan asumsi bisnis tersebut tidak dapat membayar semua keuangan sesaatnya. komitmen.

Proporsi likuiditas yang digunakan dalam menggambarkan keadaan penyajian keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2020 -

2022 adalah proporsi berjalan. Semakin tinggi jumlah sumber daya saat ini menyiratkan semakin tinggi tingkat likuiditas organisasi. Proporsi rata-rata Badan Usaha Milik Kota (BUMDes) saat ini adalah 1183,75%. Menurut Harahap (2010: 201), norma yang layak dan solid dari proporsi sumber daya saat ini adalah 200%. Sehingga cenderung beralasan jika dilihat dari proporsi likuiditas pelaksanaan keuangan yang diklaim oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didelegasikan secara mandiri atau solid (1183,75% > 200%).



BAB V

PENUTUP

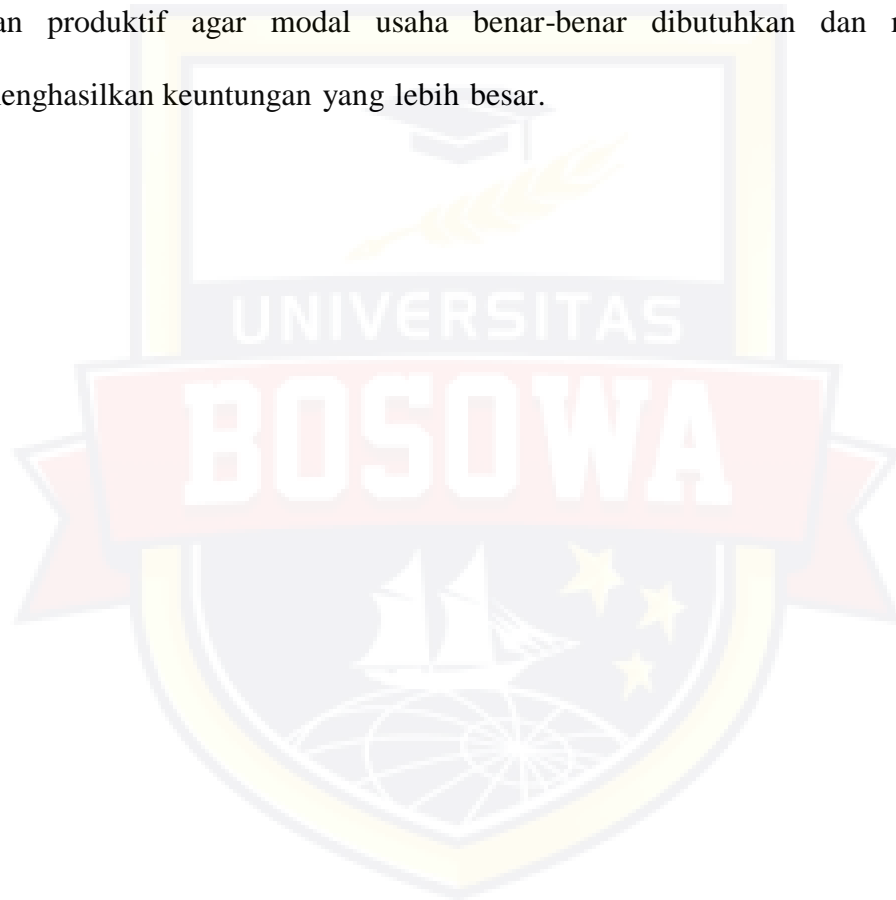
A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data menggunakan rasio profitabilitas pada Usaha yang Diklaim Kota (BUMDES) di Kota Bajiminas, Daerah Pembuatan Bir Rilau, Peraturan Bulukumba, dapat beralasan bahwa:

1. Berdasarkan Rasio Profitabilitas atau *Return On Value (ROE)*, manajemen modal atas eksekusi moneter dari Bajiminas Town Claimed Ventures, Rilau Beer Locale, Bulukumba Regime telah Kelayakan ini dibuktikan dengan proporsi Laba dari Nilai yang berada di atas proporsi standar (59,26% > 40%).
2. Dilihat dari Proporsi Likuiditas atau Rasio sumber daya saat ini (Current Proportion), administrasi modal pada pelaksanaan keuangan usaha milik kota (BUMDES) di kota-kota Bajiminas Kelurahan Rilau Ale Rezim Bulukumba telah mandiri, hal ini dibuktikan dengan proporsi sumber daya arus normal (Current Proportion) yang melebihi norma (1183,75% > 200%).
3. Mengingat Proporsi Solvabilitas atau kewajiban nilai (Obligation to Value Proportion), pengelolaan modal atas pelaksanaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDES) di Kota Bajiminas, Daerah Rilau Lager, Kabupaten Bulukumba dinamakan mahir atau sehat karena kewajiban nilai proporsi (Obligation to Value Proportion). Proporsi Nilai) di atas norma (37,04% > 30%).

B. Ide

Mengingat tujuan di atas, disarankan agar bisnis yang dapat menarik usaha bisnis harus dapat meningkatkan keuntungan sebanyak mungkin dari waktu ke waktu. Aset yang ada di kota usaha yang dimiliki di Kota Bajiminas, Kawasan Lager Rilau, Peraturan Bulukumba harus dimanfaatkan dengan tepat dan produktif agar modal usaha benar-benar dibutuhkan dan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jumarding, S. E., Manne, H. A. A., & Abdul Karim, S. E. (2021). *Desa wisata menunjang transformasi ekonomi nasional di kabupaten Enrekang*. Nas Media Pustaka.
- Fatah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Hardiyanti Kamaruddin, D., Haeruddin, M. A., Irwansyah, M. R., Mubarak, A., Pekei, M., Mardjuni, S.,...& Said, M. (2021). *Sistem Informasi Manajemen Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Publik*. Pusaka Almada.
- Ibrahim, M., Mustanir, A., & Adnan, A. A. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Move Journal*, 2(2), 56-62
- Kinasih, i., Widyahsenoh, B., & DJ, E. W. (2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(1), 33-44
- Mayasari, M. (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sekaput Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Niyati, W., & Lubis, I. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Menggunakan Metode Economic Value Added (EVA) pada PT. Adaro Energy Tbk. Periode 2011-2017. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 26-42.
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Miik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Journal of economics and Polici Studies*, 1(1) 23-33
- Putri, N. A., & Lestari, D. (2019). *Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Tenaga Kerja Muda di Jakarta*. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 31-42
- Rofidah, N.(2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gondowangi di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Universitas IslamNegeriMaulana Malik Ibrahim).
- Samudra, J. (2020). *Analisis Penertapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Uwai Sejahtera Kecamatan Bingkanang Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)

Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Desa Ditinjau dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat yang Mandiri. *Lex Renaissance*, 5(2), 488-507.

Siagian, A. O.(2020). Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Oesena di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 4(1), 33-43.

Sugiharti, H.,& Maulana, K.A. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. *Accountthink: Journal Of Accounting And Finance*, 4(2).

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.

Sutrisna, I.W.(2020). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Dalam Pembangunan Ekonomi di Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 8-15.

Utami, K. S., Tripalupi, L.E.,& Meitriana, M.A.(2019). Peran Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(2), 498-508.

Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E.R.,& Suryanto, R. (2019) Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 257-288.

L

A

M

P

I

R

A

N





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN RILAU ALE
DESA BAJIMINASA**

Nomor : 13/DBM/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa
Di
Makassar

Berdasarkan surat Universitas Bosowa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : A.0240 /FEB/UNIBOS/II/2023 Tertanggal 22 Februari 2023 perihal Permohonan Izin melakukan Pengambilan Data. Maka yang tersebut Namanya di bawah ini :

Nama : **NURWIDIYA NINGSI**
NIM : 4519012020
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan/Prodi : Manajemen
Alamat : Desa Anrang, Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba

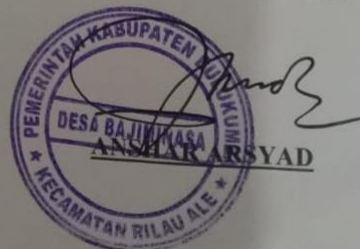
Bermaksud melakukan penelitian / pengambilan Data di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dalam rangka Penyelesaian tugas Akhir (Skripsi) dengan judul “**ANALISA PENGELOLAAN KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**” Yang akan berlangsung pada Tanggal 03 April 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada Prinsipnya kami **Mengizinkan** yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dngan ketentuan sebagai berikut ;

- a. Memenuhi semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
- b. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
- c. Penelitian/pengambilan Data tidak menyimpan dari izin yang di berikan ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (Satu) Eksemplar hasilnya kepada Kepala Desa.
- e. Surat Izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Atau sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan kegiatan Penelitian /Pengambilan/Pengumpulan data di maksud belum selesai.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajiminasa, 03 April 2023
Kepala Desa Bajiminasa



Laporan Neraca Tahun 2020

AKTIVA		
NO	KETERANGAN	JUMLAH
AKTIVA LANCAR		
1	UANG KAS BRILINK	Rp 12.043.950
2	SALDO EDC ATM	Rp 11.293.050
3	SALDO REKENING BUMDES	Rp 100.000
4	PERSEDIAAN MATERAI	Rp 100.000
5	REZKI MULIA UANG KAS	Rp 845.980
6	UANG KAS TABUNGAN	Rp 2.602.000
7	SALDO REZKI MULIA	Rp 254.020
8	SISA PIUTANG NASABAH SEPT	Rp 1.300.000
9	SISA PIUTANG NASABAH OKT	Rp 1.900.000
10	SISA PIUTANG NASABAH NOV	Rp 32.675.000
11	SISA PIUTANG NASABAH DES	Rp 31.100.000
12	ANGSURAN POKOK	Rp 8.238.000
13	BAJU SENAM	Rp 7.260.000
14	PERLENGKAPAN	Rp 57.000
JUMLAH		Rp 109.769.000

BUMDES REZKI MULIA

PASSIVA		
NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	UTANG :	
	UTANG TABUNGAN	Rp 3.600.000
2	MODAL :	
	MODAL AWAL	Rp 106.169.000
JUMLAH		Rp 109.769.000

Laporan Laba Rugi Tahun 2020

BUMDES REZKI MULIA

NO	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	ADMIN BRILINK	3.915.000
2	SEWA MOTOR	100.000
3	ADMIN PINJAMAN	2.831.000
4	ADMIN TABUNGAN	6.863.650
5	PENDAPATAN REZKI MULIA	8.703.700
6	PENDAPATAN BUNGA	12.850.000
7	PENDAPATAN DENDA	2.338.850
8	PENDAPATAN WISATA	17.917.800
LABA KOTOR		55.520.000

NO	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	ADMIN BRILINK	600.000
2	SEWA MOTOR	500.000
3	ADMIN PINJAMAN	300.000
4	ADMIN TABUNGAN	408.000
5	PENDAPATAN REZKI MULIA	3.600.000
6	PENDAPATAN BUNGA	4.500.000
7	PENDAPATAN DENDA	3.745.000
8	PENDAPATAN WISATA	4.062.000
JUMLAH		17.715.000
LABA BERSIH		37.805.000

Laporan Neraca Tahun 2021

BUMDES REZKI MULIA

AKTIVA		
NO	KETERANGAN	JUMLAH
	AKTIVA LANCAR	
1	UANG KAS BRILINK	Rp 12.043.950
2	SALDO EDC ATM	Rp 11.293.050
3	SALDO REKENING BUMDES	Rp 100.000
4	PERSEDIAAN MATERAI	Rp 100.000
5	UANG KAS REZKI MULIA	Rp 845.980
6	UANG KAS TABUNGAN	Rp 2.602.000
7	SALDO REZKI MULIA	Rp 254.020
8	SISA PIUTANG NASABAH JUL	Rp 1.300.000
9	SISA PIUTANG NASABAH AGS	Rp 1.900.000
10	SISA PIUTANG NASABAH SEPT	Rp 1.905.475
11	SISA PIUTANG NASABAH OKT	Rp 2.505.475
12	SISA PIUTANG NASABAH NOV	Rp 29.475.000
13	SISA PIUTANG NASABAH DES	Rp 31.100.000
14	ANGSURAN POKOK	Rp 8.238.000
15	BAJU SENAM	Rp 7.260.000
16	PERLENGKAPAN	Rp 57.000
	JUMLAH	Rp 98.879.000

PASSIVA		
NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	UTANG :	
	UTANG TABUNGAN	Rp 30.000.000
2	MODAL :	
	MODAL AWAL	Rp 68.879.000
	JUMLAH	Rp 98.879.000

Laporan Laba Rugi Tahun 2021

BUMDES REZKI MULIA

NO	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	ADMIN BRILINK	5.000.000
2	SEWA MOTOR	100.000
3	ADMIN PINJAMAN	2.831.000
4	ADMIN TABUNGAN	9.863.650
5	PENDAPATAN REZKI MULIA	12.357.500
6	PENDAPATAN BUNGA	20.850.000
7	PENDAPATAN DENDA	1.338.850
8	PENDAPATAN WISATA	21.747.800
LABA KOTOR		74.088.800

NO	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	BIAYA PRINT REKENING KORAN	600.000
2	TRANSPORT BRI	500.000
3	BIAYA MAKAN MINUM RAPAT	300.000
4	ATK	408.000
5	GAJI KARYAWAN	6.600.000
6	BONUS KARYAWAN	6.000.000
7	PEMELIHARAAN	3.210.000
8	PENYUSUTAN	3.523.000
JUMLAH		21.141.000
LABA BERSIH		52.947.800

Laporan Neraca Tahun 2022

BUMDES REZKI MULIA

AKTIVA		
NO	KETERANGAN	JUMLAH
	AKTIVA LANCAR	
1	UANG KAS BRILINK	Rp 12.043.950
2	SALDO EDC ATM	Rp 11.293.050
3	SALDO REKENING BUMDES	Rp 100.000
4	PERSEDIAAN MATERAI	Rp 100.000
5	UANG KAS REZKI MULIA	Rp 845.980
6	UANG KAS TABUNGAN	Rp 2.602.000
7	SALDO REZKI MULIA	Rp 254.020
8	SISA PIUTANG NASABAH MEI	Rp 3.431.000
9	SISA PIUTANG NASABAH JUL	Rp 2.200.000
10	SISA PIUTANG NASABAH SEPT	Rp 5.400.000
11	SISA PIUTANG NASABAH NOV	Rp 9.791.049
12	SISA PIUTANG NASABAH DES	Rp 29.475.000
13	ANGSURAN POKOK	Rp 8.238.000
14	BAJU SENAM	Rp 7.260.000
15	PERLENGKAPAN	Rp 57.000
	JUMLAH	Rp 80.990.099

PASSIVA		
NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	UTANG :	
	UTANG TABUNGAN	Rp 31.655.099
2	MODAL :	
	MODAL AWAL	Rp 49.335.000
	JUMLAH	Rp 80.990.099

Laporan Laba Rugi Tahun 2022

BUMDES REZKI MULIA

NO	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	ADMIN BRILINK	5.000.000
2	SEWA MOTOR	100.000
3	ADMIN PINJAMAN	2.831.000
4	ADMIN TABUNGAN	9.863.650
5	PENDAPATAN REZKI MULIA	9.703.700
6	PENDAPATAN BUNGA	12.850.000
7	PENDAPATAN DENDA	1.338.850
8	PENDAPATAN WISATA	11.747.800
LABA KOTOR		53.435.000

NO	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	BIAYA PRINT REKENING KORAN	600.000
2	TRANSPORT BRI	500.000
3	BIAYA MAKAN MINUM RAPAT	300.000
4	ATK	408.000
5	GAJI KARYAWAN	6.600.000
6	BONUS KARYAWAN	5.000.000
7	PEMELIHARAAN	3.745.000
8	PENYUSUTAN	4.062.000
JUMLAH		21.141.000
LABA KOTOR		32.220.000

**Proses Penjelasan Laporan keuangan Bumdes Desa Bajiminasa kec Rilau
Ale kab Bulukumba**

